BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Definisi lain menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* (dana penuh) yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan peruntukannya bebas/tidak terikat (Setyawati, 2007). Menurut UU No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah Kabupaten/kota

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan Presiden. Setiap provinsi/ kabupaten/ kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama dan ini diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah (www.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum).

Menurut Sulistyawan (2007), DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 25 tahun 1999). DAU ditetapkan sekuarng-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dari 25% trsebut dirinci lagi yang 10% untuk DAU daerah propinsi, sedangkan yang 90% digunakan untuk DAU daerah kabupaten dan kota. DAU untuk daerah propinsi, ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah propinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah propinsi yang bersangkutan. Porsi daerah yang bersangkutan merupakan proporsi bobot daerah propinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah propinsi di Indonesia. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Porsi daerah yang bersangkutan

merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di Indonesia.

DAU merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (Widjaja, 2002 dalam Sulistyawan, 2007). DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar-daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas, akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah membiayai belanja daerahnya selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bank pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. PAD juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Abdullah dan Halim, 2003 dalam Sulistyawan, 2007). Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

3. Belanja Modal

Menurut Abdullah (2008), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang akan menambah aset atau kekayaan daerah

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Jenis belanja modal ini dapat berupa belanja tanah, belanja peralatan, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset-aset lainnya.

4. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pengeluarannya.

Secara konsepsional ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Halim, 2004 dalam Apriana, 2010):

a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi.
c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu tahap awal yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan cara mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan

ekonomi daerah yang dicita-citakan. Sebab secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999 dalam Apriana, 2010). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan / kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk menaikkan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (2000) dalam Apriana (2010), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, yaitu akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan

pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya (Apriana, 2010).

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Dana Alokasi Umum dan Kemandirian Daerah

Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuan diberikannya DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini mengakibatkan, dana yang digunakan untuk membiayai belanja daerah sebagian besar berasal dari DAU, karena pemerintah daerah tidak mengoptimalkan sumber pendapatan asli

Dengan semakin besarnya DAU yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan kata lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Jadi, semakin besar jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian daerah tersebut masih rendah. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum berhubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakhiya (2011) yang menguji Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kemandirian daerah; Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sampel penelitian pada kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan dengan tahun penelitian 2004-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, serta PAD, DAU dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah

2. Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah

Upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Peningkatan kemandirian tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005).

Bapennas (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD diseluruh propinsi dalam era otonomi daerah. Susilo dan Adi (2007) membuktikan hal yang sama pada kabupaten/kota di jawa tengah.

Menurut Susilo dan Adi (2007) peningkatan PAD dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian. Hamzah (2008) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran dalam menjalankan pemerintahannya.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa daerah telah mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi daerahnya, dengan melakukan pembangunan pada sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan PAD dalam jumlah besar, sehingga pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada transfer pemerintah pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jadi, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang tinggi juga. Jadi, PAD berhubungan positif dengan kemandi

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2010) yang menguji rasio kemandirian daerah tahun lalu, rasio efisiensi tahun lalu, dan rasio efektivitas tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah; PAD tahun berjalan dan rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan. Sampel penelitian pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah dan tahun penelitian yaitu 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan di Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Tengah, PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan, dan Rasio Kemandirian tahun lalu berpengaruh negatif terhadap belanja modal tahun berjalan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Sastriyani (2011) dan Zakhiya (2011). Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

3. Belanja Modal dan Kemandirian Daerah

Bapennas (2003) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Wong (2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005 dalam Harianto dan Adi, 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila belanja modal semakin tinggi, maka kemandirian daerah juga akan meningkat. Hal ini disebabkan dengan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah menarik minat investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dapat menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat akan berkurang dan tingkat kemandirian daerah semakin tinggi. Jadi, belanja modal berhubungan positif terhadap kemandirian daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sastriyani (2011) yang menguji Belanja Pembangunan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhun Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan maupun Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah; serta Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pembangunan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Sama

penelitian pada kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan tahun penelitian 1999-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Apriana (2010). Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

4. Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan semua kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui PDRB. Kombinasi produksi dan harga barang atau jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan atau penurunan nilai PDRB.

Transfer dana dari pusat berupa DAU ditujukan untuk membantu daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil dari pembangunan ini dapat meningkatkan produksi dari barang maupun jasa yang dapat mempengaruhi nilai PDRB suatu daerah. Jika produksi barang atau jasa meningkat disertai dengan harga yang stabil maka PDRB juga meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi

juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, semakin besar jumlah DAU yang diterima daerah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010) yang menguji Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sampel kabupaten/ kota di tiga propinsi di daerah Pulau Jawa dan Bali dengan tahun penelitian 2004-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positifdan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tritanto (2011) dan Zakhiya (2011). Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

5. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Saragih (2003) dalam Harianto dan Adi (2007) peningkatan

Sidik (2002) dalam Harianto dan Adi (2007) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (Adi, 2007 dalam Apriana, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2006) menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan masyarakatnya. Masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktifitas investasi maupun belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Apriana (2010) yang menguji Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah; Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian kabupaten dan kota se-Jawa – Bali pada tahun penelitian 2003 – 2007, menunjukkan bahwa PAD mempunyai dampak yang positif dan signifikan dengan Kemandirian Daerah. Belanja Modal tidak

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah serta belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini didukung oleh Zakhiya (2011) dan Tritanto (2011). Dewi (2010) tidak mendukung hipotesis ini. Dari pemaparan di atas dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_5 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kuncoro (2007) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Adi (2007) dalam Apriana (2010) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Realitas ini mendukung temuan Wong (2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan adanya pembangunan kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri.

Dengan dilakukannya pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur dapat mengundang hadirnya investor sehingga tingkat pertumbuhan

ekonomi daerah akan meningkat. Dengan demikian, belanja yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuat sarana dan prasarana infrastruktur daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tritanto (2011) yang menguji Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap terhadap belanja modal; Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi; serta Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Sampel penelitian pada kabupaten dan kota di tiga provinsi di daerah Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2007-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD tidak bepengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal bepengaruh positif terhadap petumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sari (2011) dan Sastriyani (2011). Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_6 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

7. Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, akan tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru. Hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi

yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002) dan Wong (2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang di miliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif lainnya. Dengan dilakukannya pembangunan pada sektor-sektor produktif ini dapat meningkatkan nilai PDRB yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka ketergantungan pada pemerintah pusat akan semakin berkurang dan akhirnya dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyanda (2010) yang menguji kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan; kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian secara langsung berpengaruh terhad

pengangguran; kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan. Sampel penelitian pada pemerintahan daerah di Kabupaten/ Kota di provinsi D.I.Yogyakarta dengan tahun penelitian 2001-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hipotesis tersebut didukung oleh Haryati (2011) dan Wijaya (2011). Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_7 : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Model Penelitian

Model penelitian yang dipakai berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan seperti gambar berikut ini:

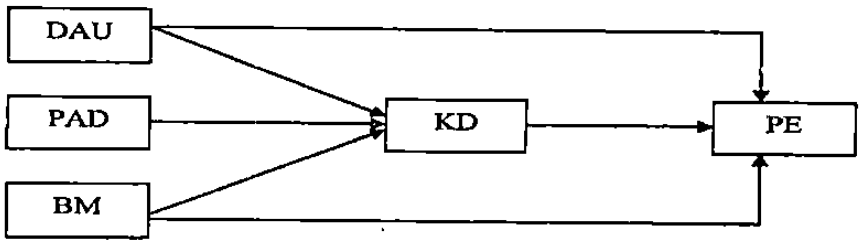

2005	2006	2007
2006	2007	2008
2007	2008	2009

Gambar 2.1
Model Penelitian Periode 2005-2009